

Kehadiran Armada Militer Amerika Serikat Pada Sengketa Kepulauan Spratly Tahun 2011 (*United States Military Presence in Spratly Islands Dispute at 2011*)

Handhitya Yanuar Pamungkas, Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Drs. Agung Purwanto, M.Si.
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Sengketa klaim Kepulauan Spratly melibatkan enam negara, yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun aktor lain seperti Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan di Kepulauan Spratly. Ketika sengketa kembali memanas pada tahun 2011, Amerika Serikat memutuskan untuk ikut terlibat dalam sengketa ini. Kehadiran Amerika Serikat di Kepulauan Spratly adalah untuk melindungi aliansinya yaitu Filipina. Selain itu, Amerika Serikat juga berupaya untuk melakukan *deterrence* terhadap Cina. Upaya pencegahan ini harus dilakukan Amerika Serikat agar Cina tidak menggunakan kekuatan militernya untuk memaksakan klaim tunggal atas Kepulauan Spratly. Jika Kepulauan Spratly menjadi bagian dari teritori Cina, maka secara tidak langsung akan memengaruhi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Pasifik.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Cina, *deterrence*, Kepulauan Spratly, militer.

Abstract

Spratly Islands dispute involve by six countries, which are China, Taiwan, Vietnam, Philippines, Malaysia and Brunei Darussalam. But other actor like United States also have an interest in Spratly Islands. As the dispute heated up again in 2011, the United States decided to get involved in this dispute. United States presence in the Spratly Islands is to protect its allies, the Philippines. In addition, the United States also seeks to make deterrence against China. Prevention efforts should be made by United States, so China doesn't use its military capabilities to force the whole claim of Spratly Islands. If Spratly Islands become China's territory, it will indirectly affect United States interest in Pacific.

Keywords: China, *deterrence*, military, Spratly Islands, United States of America.

Pendahuluan

Ketegangan saling klaim atas kawasan Kepulauan Spratly kembali terjadi pada Juni tahun 2011. Ketegangan di Kepulauan Spratly tersebut muncul setelah adanya insiden kontak senjata antara tentara Vietnam dan Cina. Juga karena adanya insiden penembakan kapal-kapal nelayan Filipina yang dilakukan oleh Cina. Ketegangan semakin memanas setelah Cina memutuskan mengirim kapal perangnya untuk berpatroli di kawasan sengketa tersebut.^[1] Hal ini menarik perhatian Amerika Serikat untuk ikut terlibat untuk mencegah ketegangan tersebut menjadi konflik terbuka.

Keterlibatan Amerika Serikat pada sengketa Kepulauan Spratly tidak lepas dari kekhawatiran Amerika Serikat pada kekuatan militer Cina yang berkembang pesat. Salah satu tanda peningkatan kekuatan militer Cina adalah semakin modern dan bertambahnya armada militer Cina. Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, Mike Mullen, menyatakan bahwa tanpa diminta hadir pun, Amerika Serikat merasa bertanggung jawab untuk hadir di perairan selatan Cina.^[2] Senada dengan Mullen, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menyatakan

bahwa Amerika Serikat merasa berkepentingan dalam menjamin kebebasan bernavigasi di Laut Cina Selatan.^[3]

Kepulauan Spratly adalah gugusan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau karang yang terletak di kawasan Laut Cina Selatan (LCS). Kepulauan Spratly kira-kira berjumlah 600-an pulau, dan 100-an di antaranya kerap tertutup permukaan air laut jika sedang pasang. Kepulauan Spratly menjadi sangat penting karena kondisi letak geografis maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya, seperti minyak, gas, dan bahan tambang lainnya.^[4] Hal ini berarti, dengan mendapatkan Kepulauan Spratly maka akan mampu mengurangi ketergantungan akan impor minyak dan memiliki cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Selain kekayaan alam yang dimiliki, kawasan Kepulauan Spratly merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional yang strategis. Karena potensi Kepulauan Spratly ini maka banyak negara berusaha mengklaim Kepulauan Spratly untuk masuk ke dalam teritori negaranya.

Saling klaim dan upaya-upaya penguasaan atas wilayah-wilayah di Kepulauan Spratly dilakukan sedikitnya oleh enam negara, yaitu Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia.^[5] Persoalannya menjadi lebih rumit

karena klaim-klaim tersebut saling tumpang tindih karena masing-masing negara menganggap “benar” klaim versinya sendiri. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan dan penempatan militer di sebagian wilayah kepulauan yang kemudian memicu adanya insiden kontak senjata militer.

Dalam peta yang dikeluarkan oleh masing-masing negara yang terlibat dalam sengketa kepulauan Spratly, negara-negara tersebut menamainya dengan nama yang berbeda-beda. Taiwan misalnya menamakan Kepulauan Spratly dengan Shinnengunto, Vietnam menyebut dengan Dao Truong Sa (Beting Panjang), Filipina menyebut Kalayaan (Kemerdekaan), Malaysia menyebut dengan Itu Aba dan Terumbu Layang, sedangkan Cina menyebut Nansha Quadao (kelompok Pulau Selatan). Perbedaan nama tersebut menunjukkan bahwa Kepulauan Spratly merupakan milik negara yang memberikan nama. Namun nama internasional yang lazim diberikan kepada gugusan kepulauan itu ialah Spratly.

Cina merupakan negara pertama yang melakukan klaim atas Kepulauan Spratly. Tuntutan Cina terhadap Spratly didasarkan pada sejumlah catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut Cina mengklaim bahwa Kepulauan Spratly secara historis merupakan wilayah kekuasaan Cina sejak masa kekaisaran Dinasti Han, yakni 206-220 Sebelum Masehi (SM) sampai ke masa Dinasti Ming dan Dinasti Ching yang berkuasa pada tahun 1400-an. Klaim ini didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han.^[6]

Cina juga berusaha mengukuhkan kehadirannya di Laut Cina Selatan secara *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, Cina mengeluarkan Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan *Contiguous Zone* pada tanggal 25 Februari 1992, yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Secara *de facto*, Cina telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanan menuju ke arah tercapainya armada samudra.^[7]

Vietnam menentang pendapat Cina dengan menyebutkan bahwa Kaisar Gia Long dari Vietnam pada tahun 1802 telah mencantumkan Spratly sebagai wilayah kekuasaannya. Nelayan Vietnam pun sebelumnya telah lama melakukan pelayaran ke dan dari wilayah Kepulauan Spratly itu. Klaim lain datang dari Malaysia yang mengatakan bahwa sebagian dari Kepulauan Spratly merupakan wilayah negara bagian Sabah yang dinamai Terumbu Layang. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta Batas Landas Kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari Kepulauan Spratly. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya. Dua gugus tersebut yaitu Terumbu Laksamana yang diklaim oleh Filipina dan Amboyna yang diklaim oleh Vietnam.

Sementara Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris pada 1 Januari 1984 kemudian ikut mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Sedangkan Taiwan mengatakan Kepulauan Spratly merupakan warisan kekaisaran Cina dan mengklaim

Kepulauan Spratly dengan dalih yang sama dengan dalih klaim yang diajukan oleh Cina.^[8]

Sedangkan Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian Timur kepulauan Spratly pada tahun 1968. Filipina menganggap bahwa Spratly merupakan bagian dari Kepulauan Kalayaan.^[9] Pada tahun 1978, Filipina kembali mengklaim dua gugus pulau lainnya. Alasan Filipina mengklaim kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun. Filipina juga menunjuk perjanjian perdamaian San Francisco 1951, yang menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly selama Perang Dunia II dan meninggalkannya setelah kealahannya tanpa menyebutkan kepada siapa kepulauan tersebut akan diserahkan.^[10]

Karena adanya saling klaim oleh negara-negara tersebut, mengakibatkan terjadinya beberapa ketegangan yang akhirnya menimbulkan kontak senjata di Kepulauan Spratly. Pada bulan April tahun 1988 terjadi ketegangan di Kepulauan Spratly antara Vietnam dengan Cina. Dua puluh kapal perang Cina yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan mencegah Angkatan Laut Vietnam sehingga terjadi kontak senjata. Kontak senjata antara Cina dan Vietnam ini terjadi di sekitar Karang Johnson Selatan. Peristiwa yang sekarang dikenal sebagai peristiwa 14 Maret 1988 ini, mengakibatkan 74 tentara Vietnam hilang dan tujuh lainnya dilaporkan tewas.^[11] Ketegangan kembali terjadi pada tahun 2002, ketika tentara Vietnam melepaskan tembakan ke udara untuk memperingatkan pesawat mata-mata Filipina yang terbang di atas wilayah sengketa tersebut.^[12]

Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) kembali memanas pada pertengahan tahun 2011, setelah terjadi ketegangan antara Vietnam dan Cina. Selain itu, ketegangan juga diakibatkan karena insiden penembakan kapal-kapal nelayan Filipina oleh Cina. Pemerintah Filipina pun dibuat gusar akan keadaan ini. Terlebih setelah Cina mengirimkan kapal perangnya untuk berpatroli di kawasan tersebut.^[13] Filipina bereaksi dengan kembali menyetujui klaim atas Kepulauan Spratly. Filipina melalui Presiden Benigno Aquino III alias Noyonoy bahkan melontarkan pernyataan yang provokatif dengan menyebut bahwa Laut Cina Selatan sekarang telah berubah nama menjadi Laut Filipina Barat. Bahkan, nama baru tersebut sudah resmi digunakan oleh Filipina mulai tanggal 1 Juni 2011.^[14]

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dengan diterapkannya suatu metode penelitian, hal ini akan bermanfaat untuk mendapatkan suatu kerangka berfikir dan data-data yang dibutuhkan secara memadai agar karya tulis memiliki bobot ilmiah yang tinggi.

Metode pengumpulan data adalah tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan terhadap sumber dan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penelaahan atas buku-buku, jurnal, koran atau majalah, situs internet dan segala

informasi yang tercatat dan menunjang jalannya penelitian. Sehingga kemudian yang didapat adalah data sekunder yang berupa kumpulan laporan dari pihak lain yang sebelumnya merupakan sumber asli.

Sedangkan metode analisis data merupakan uraian tentang cara mengkaji data dan mengolah data awal sehingga menjadi data atau informasi tentang cara menganalisisnya. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif - kualitatif. Data akan dianalisa secara lebih lanjut guna mencari fakta-fakta yang nantinya akan mendukung hasil akhir dari penulisan yang dilakukan. Hal ini dilakukan karena data-data dan informasi yang diperoleh penulis merupakan sebuah data yang bersifat sekunder, sehingga data yang telah diperoleh tidak dapat dilakukan pengukuran secara langsung. Adapun konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah konsep aliansi dan konsep *deterrence*.

Hasil dan Pembahasan

Kepulauan Spratly merupakan kawasan yang masuk ke dalam kawasan Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly sangat bernilai, baik dari segi ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, kawasan ini juga merupakan jalur pelayaran dan jalur lintas laut perdagangan internasional. Sehingga, tidak mengherankan apabila banyak negara yang berusaha untuk menjadikan kawasan Kepulauan Spratly masuk ke dalam teritori mereka.

Klaim dan upaya-upaya penguasaan atas wilayah-wilayah di Kepulauan Spratly dilakukan sedikitnya oleh enam negara, yaitu Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia. Klaim negara-negara tersebut terhadap Kepulauan Spratly didasarkan pada sejumlah catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, maupun penggunaan gugus-gugus pulau oleh para nelayannya.

Persoalannya menjadi lebih rumit karena klaim-klaim tersebut saling tumpang tindih karena masing-masing negara menganggap "benar" klaim versinya sendiri. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh maupun sebagian wilayah kepulauan, yang kemudian memicu adanya sengketa dan kontak senjata.

Kepulauan Spratly menyimpan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi dan gas alam. Meskipun masih simpang siur tentang berapa nilai pasti minyak bumi dan gas alam yang terkandung di Kepulauan Spratly namun beberapa lembaga dan analis sudah mengestimasi tentang berapa nilai kandungan yang ada. Analisis Clive Schofield dan Ian Storey menyebut angka 1-2 miliar barrel minyak dan 225 trilyun meter kubik gas alam terkandung di kawasan Kepulauan Spratly. Sementara estimasi lembaga statistik Amerika Serikat, *Energy Information Administration* (EIA) menyatakan di bawah Kepulauan Spratly terkandung sedikitnya 7 miliar barrel minyak dan 150,3 trilyun meter kubik gas alam. [15]

Selain kandungan sumber daya alam yang dimiliki, kawasan di Kepulauan Spratly juga menjadi salah satu jalur pelayaran dan jalur lintas laut perdagangan internasional

terpenting. Kepulauan Spratly merupakan jalur penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik melalui Selat Malaka. Jalur ini juga menghubungkan negara-negara Asia Timur dengan benua Eropa dan Afrika. Lebih dari 25% dari perdagangan dunia melintasi Kepulauan Spratly. Nilai ini termasuk 70% kebutuhan energi Jepang dan 65% kebutuhan energi China. [16]

Berada di antara dua samudra besar dan sebagai salah satu jalur pelayaran dan perdagangan paling strategis, kawasan Kepulauan Spratly juga memiliki arti penting bagi pertahanan suatu negara. Kawasan Kepulauan Spratly bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan pengamatan (*surveillances*) ataupun pencegahan (*interdiction*) terhadap segala bentuk aktifitas militer negara lain yang melewati jalur ini. Keuntungan dari segi militer ini pula yang membuat negara-negara yang terlibat sengketa untuk melakukan militerisasi di kawasan ini.

Dalam perkembangannya, sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly tidak hanya terjadi dalam konteks saling menyatakan klaim saja, namun juga berujung pada terjadinya kontak senjata. Sejak tahun 1974, telah terjadi beberapa kali ketegangan antar negara pengklaim. Namun baru sejak tahun 1980-an, sengketa mengarah kepada kontak senjata secara terbuka. Sebagian besar kontak senjata tersebut melibatkan Cina, Vietnam, dan Filipina.

Untuk lebih menguatkan klaim, beberapa upaya lain juga dilakukan oleh masing-masing negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara pendirian bangunan, lobi di forum internasional, ataupun dengan penempatan pasukan di kawasan Kepulauan Spratly.

Setelah sempat relatif tenang, sengketa di Kepulauan Spratly kembali memanas pada pertengahan tahun 2011. Hal ini setelah terjadi ketegangan antara Vietnam dan Cina. Vietnam mengatakan bahwa sebuah kapal berbendera Cina telah menabrak kabel dari kapal eksplorasi minyak milik Vietnam, yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam. Selain itu, ketegangan juga diakibatkan karena insiden penembakan kapal-kapal nelayan Filipina yang dilakukan oleh Cina. Pemerintah Filipina pun dibuat gusar akan keadaan ini, terlebih setelah Cina mengirimkan kapal perangnya untuk berpatroli di kawasan tersebut.

Ketegangan yang terjadi menarik perhatian Amerika Serikat untuk ikut terlibat pada sengketa Kepulauan Spratly ini. Amerika Serikat berdalih bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa tersebut atas dasar kepentingan kebebasan navigasi, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas, menghormati hukum internasional dan perdagangan bebas tanpa adanya hambatan di Laut Cina Selatan.

Meskipun mendapat penolakan dari Cina, namun Amerika Serikat tetap memutuskan untuk hadir pada sengketa ini. Menurut penulis, ada dua alasan utama kenapa Amerika Serikat hadir pada sengketa ini. (1) ingin melindungi Filipina sebagai negara aliansinya, dan (2) ingin melakukan *deterrence* terhadap Cina, sehingga Cina tidak memaksakan klaim tunggal atas Kepulauan Spratly melalui kekuatan militer yang dimiliki.

Ketika Cina melakukan tindakan provokatif di Kepulauan Spratly, maka praktis tidak ada yang berani berhadapan secara langsung dengan Cina. Hal ini karena

kekuatan militer yang dimiliki negara-negara pengklaim kalah jauh bila dibandingkan dengan Cina.

Filipina kemudian lebih memilih untuk meminta pertolongan dari aliansinya, Amerika Serikat. Permintaan tolong inilah yang juga menjadi pintu masuk lain bagi Amerika Serikat. Sehingga ada alasan yang lebih kuat bagi Amerika Serikat untuk ikut terlibat pada sengketa Kepulauan Spratly. Amerika Serikat dan Filipina telah menjalin Pakta Pertahanan Bersama pada tanggal 30 Agustus 1951. Dalam Pakta Pertahanan Bersama disebutkan bahwa masing-masing negara siap membantu mempertahankan satu sama lain andaikata ada agresor yang menyerang wilayah mereka.

Kehadiran Amerika Serikat juga tidak terlepas dari kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Cina. Bertumbuhnya perekonomian Cina membuat Cina harus mencari tempat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam guna mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Hal ini membuat Cina terlibat beberapa sengketa wilayah dengan negara lain yang juga ikut mengklaim wilayah tersebut. Seperti Cina-Jepang terkait Pulau Shenkaku, maupun Cina dengan beberapa negara Asia Tenggara terkait sengketa Kepulauan Spratly. Selain itu, bertumbuhnya ekonomi Cina juga membuat anggaran militer Cina juga meningkat dan akhirnya berdampak pada perkembangan militer Cina yang semakin tangguh.

Cina kini tengah memperkuat militernya, baik di darat, udara, maupun laut. Untuk menjaga keamanan wilayah darat, Cina terus meningkatkan kekuatan daratnya. Selain penambahan dan pembaharuan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista), beberapa pusat pelatihan dan penelitian peralatan militer telah dibangun. Salah satunya adalah *Center for the Study of China Military Affairs*. Pusat studi ini berfungsi sebagai tempat penelitian sekaligus pengembangan kekuatan militer Cina. Untuk Angkatan Udara, kini Cina tengah mengembangkan pesawat siluman J-20. Pesawat ini telah diuji coba kan pada awal 2011 dan sukses masuk ke kawasan Guam tanpa tertangkap radar Amerika Serikat. Selain J-20, Cina juga mengembangkan kapasitas desain yang tangguh lewat Su-30 dan Su-27 buatan Rusia. Modernisasi angkatan udara Cina juga berupa pengembangan kapasitas isi ulang bahan bakar yang bisa menambah jarak tempuh pesawat-pesawat tempur dan pesawat pengintai milik Cina.

Cina juga sedang mengembangkan sistem misil mereka, terutama jenis *conventional ballistic missile* dan *cruise missile*. Penyebaran *cruise missile* memainkan peranan penting termasuk *anti-shipping*, *anti-radiation*, *ground attack*, dan pengiriman senjata nuklir. Cina juga sedang menguji coba misil JL-2. Misil ini merupakan versi laut dari varian DF-31 (yang merupakan *land-mobile long-range missile*). Misil JL-2 masuk ke dalam kategori *Submarine-Launched Ballistic Missile* (SLBM). Misil ini diklaim sebanding, dalam hal ukuran dan kinerja, dengan misil Trident C-4 milik Amerika Serikat, dimana sama-sama dapat diluncurkan dari kapal selam pada saat berada di bawah permukaan air (*submerged submarines*).

Modernisasi angkatan laut menjadi salah satu prioritas pemerintahan Cina saat ini. Cina kini sedang melakukan pembaharuan kapal perusak dan *frigate* yang dimiliki, agar Angkatan Laut mereka bisa berlayar lebih jauh

dan mempunyai kekuatan yang lebih baik. Cina juga mengembangkan misil balistik kapal selam terbarunya dari kelas Jin, yang bisa meluncurkan rudal berhulu ledak nuklir dari bawah laut. Selain itu, Cina juga membangun sebuah markas angkatan lautnya di Hainan, sebuah provinsi kepulauan di Cina selatan, yang diklaim bisa menangani serangan kapal selam. Selain itu, Angkatan Laut Cina kini juga mempunyai sebuah kapal induk eks Soviet yang diberi nama Liaoning.

Dengan kekuatan militer yang dimiliki Cina tersebut, Amerika Serikat khawatir Cina akan menggunakan kekuatan militernya untuk melakukan klaim tunggal terhadap Kepulauan Spratly. Indikasi bahwa Cina ingin melakukan klaim tunggal atas Kepulauan Spratly terlihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina. Cina kini sedang mempersiapkan pembangunan sebuah garnisum atau markas pasukan militer di kawasan Laut Cina Selatan. Garnisum ini nantinya akan memudahkan Cina untuk mengawasi dan memperkuat kekuatan militer Cina di Kepulauan Spratly. Meskipun begitu, pihak Cina belum memastikan kapan pembangunan garnisum tersebut akan dimulai. Indikasi lain adalah penolakan proposal damai yang ditawarkan oleh Filipina. Dalam proposalnya, Filipina menginginkan untuk membawa masalah sengketa ini ke badan peradilan independen Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Amerika Serikat kemudian mengambil kebijakan dengan meningkatkan pengiriman senjata ke Filipina untuk memodernisasi angkatan laut Filipina. Amerika Serikat juga menegaskan kesiapan untuk membantu pengadaan sistem persenjataan yang dibutuhkan sekutunya itu. Amerika Serikat juga melakukan latihan perang bersama dengan Angkatan Bersenjata Filipina. Latihan perang bersama antara Amerika Serikat dan Filipina berlangsung selama 11 hari di sekitar Kepulauan Palawan, sebelah barat Filipina. Dalam latihan militer itu, Amerika Serikat mengerahkan dua kapal perusak yang dilengkapi peluru kendali laut ke laut, satu kapal penyelamat dan 800 personil Angkatan Laut. Amerika Serikat juga menempatkan beberapa kapal selamnya untuk berpatroli di perairan Filipina.

Selain melakukan latihan perang bersama, armada dari Pangkalan Militer Angkatan Laut ke-7 (*7th fleet*) Amerika Serikat di Pasifik juga terus dipersiapkan untuk bersiaga di sekitar kawasan Kepulauan Spratly. Beberapa kapal tempur, seperti USS Chung Hoon dan USS Howard telah bersiaga di Puerto Princess, Kepulauan Palawan. Kapal induk seperti USS Independence dan USS George Washington, juga telah ditempatkan di pantai barat Filipina. Selain itu, Amerika Serikat telah mengirimkan pesawat tempur F-22 Raptor, pesawat transport jenis C-17, serta USS Safeguard untuk mendukung armada yang telah ada sebelumnya.

Upaya lain juga dilakukan Amerika Serikat dengan memperkuat dan meningkatkan kerjasama aliansi dengan negara lain di kawasan Pasifik. Amerika Serikat berencana untuk menempatkan marinirnya di Darwin, Australia. Direncanakan akan ada 2.500 personel marinir yang akan bertugas di pangkalan tersebut. Amerika Serikat juga berencana menempatkan beberapa kapal perang di Singapura dan melakukan aktifitas militer di kawasan Thailand. Selain itu, untuk pengamanan jangka panjang,

Amerika Serikat juga berencana untuk membuka kembali pangkalan Subic Bay dan Clark di Filipina.

Upaya pencegahan ini harus dilakukan oleh Amerika Serikat karena bila Cina benar-benar berhasil menguasai Kepulauan Spratly, maka Cina akan mendominasi kawasan ini. Dominasi Cina di Kepulauan Spratly sedikit banyak akan berpengaruh pada sektor transportasi laut. Segala bentuk pelayaran yang melewati jalur yang melalui Kepulauan Spratly harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Cina. Hal ini jelas akan mempengaruhi aktifitas negara-negara, termasuk Amerika Serikat, yang selama ini menggunakan jalur ini. Kapal-kapal, baik komersil maupun militer, tidak akan bisa leluasa lagi ketika melewati Kepulauan Spratly.

Kesimpulan

Sengketa Kepulauan Spratly kembali memanas pada tahun 2011 setelah adanya insiden penembakan kapal Filipina oleh militer Cina. Filipina akhirnya lebih memilih untuk meminta bantuan keamanan militer kepada negara sekutunya, Amerika Serikat. "Undangan" dalam bentuk bantuan keamanan militer dari Filipina inilah yang menjadi pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk ikut terlibat dalam sengketa Kepulauan Spratly. Amerika Serikat kemudian melakukan latihan bersama dengan angkatan bersenjata Filipina. Dalam latihan tersebut, Amerika Serikat mengerahkan armada militernya dari pangkalan angkatan laut ke-7 (7th fleet). Selain itu, Amerika Serikat juga berjanji untuk meningkatkan kapabilitas militer Filipina dengan memodernisasi dan menyediakan kebutuhan militer Filipina.

Selain untuk melindungi aliansinya, kehadiran Amerika Serikat dalam sengketa Kepulauan Spratly juga tidak terlepas dari upaya untuk melakukan *deterrence* terhadap Cina. Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai penguasa di kawasan Pasifik. Namun status tersebut bisa saja terancam dengan kehadiran Cina sebagai *rising state* di kawasan ini. Dengan perumbuhan ekonomi yang tinggi membuat Cina mampu untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Peningkatan kapabilitas Cina inilah yang menjadi kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat khawatir bahwa Cina akan menggunakan kekuatan militer yang dimilikinya untuk memaksakan klaim tunggal atas Kepulauan Spratly. Jika Kepulauan Spratly benar jatuh ke tangan Cina, maka Cina akan semakin kuat mengingat makna strategis yang dimiliki oleh Kepulauan Spratly. Cina berpotensi akan menjadi "polisi" baru di kawasan Pasifik. Sedikit banyak ini akan mengganggu dan mengancam kepentingan Amerika sebagai "penguasa" kawasan Pasifik terdahulu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam proses penyelesaian penelitian ini tentu saja terdapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Hary Yuswandi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;

Bapak Drs. Supriyadi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Dosen Pembimbing Akademik; Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama; Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika di jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Paman Sam Memperkeruh Situasi Spratlys. <http://majalahforum.com/internasional.php?tid=70>. [24 Juli 2011]
- [2] Seperti Ini Cara Amerika Melampiaskan Kecemburuannya Terhadap Cina. http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=34647&Itemid=18. [9 September 2011]
- [3] AS-Vietnam Desak Perdamaian di Laut China Selatan. <http://www.antaraneews.com/berita/263597/as-vietnam-desak-perdamaian-di-laut-china-selatan>. [19 September 2011]
- [4] Geopolitik Kepulauan Spratly : Konflik Kembali Menegang. <http://tabailenge.wordpress.com/2010/10/16/geopolitik-kepulauan-spratly-konflik-kembali-menegang>. [19 Juli 2011]
- [5] Sengketa atas Kepulauan Spratly-Paracel Kembali Mencuat di Laut Cina Selatan. Jawa Pos edisi tanggal 19 Juni 2011.
- [6] Dilema Keamanan Asean Dalam Konflik Laut Cina Selatan. <http://dewitri.wordpress.com/2009/01/03/dilema-keamanan-asean-dalam-konflik-laut-cina-selatan/>. [20 Juli 2011]
- [7] Eduardo. Upaya Diplomasi Preventif Indonesia Dalam Sengketa Kepulauan Spratly. <http://www.scribd.com/doc/36929177/Upaya-Diplomasi-Preventif-Indonesia-Dalam-Sengketa-Kepulauan-Spratly>. [20 Juli 2011]
- [8] Dilema Keamanan Asean Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Op.Cit.*
- [9] *Ibid.*
- [10] Upaya Diplomasi Preventif Indonesia Dalam Sengketa Kepulauan Spratly. *Op.Cit.*
- [11] Sengketa atas Kepulauan Spratly-Paracel Kembali Mencuat di Laut Cina Selatan. *Op.Cit.*
- [12] *Ibid.*
- [13] Paman Sam Memperkeruh Situasi Spratlys. *Op.Cit.*
- [14] Sengketa atas Kepulauan Spratly-Paracel Kembali Mencuat di Laut Cina Selatan. *Op.Cit.*
- [15] Adu Cakar di Laut Cina Selatan. <http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/07/adu-cakar-di-laut-china-selatan/>. [18 September 2011]
- [16] Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan. *Op.Cit.*